

## ABSTRAK

**Khaeruni Aisyah : Fatwa Ekonomi DSN-MUI Tentang Tabungan (Studi Kritis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pada Skema *Mudhârabah*).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang dijadikan rujukan oleh para regulator dalam menetapkan regulasi produk lembaga keuangan syariah seperti *mudhârabah*. Penelitian ini berdasarkan pada teori fatwa, bahwa kekuatan hukum fatwa bersifat tidak mengikat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis struktur fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, mekanisme penetapan fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan aplikasi fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan khususnya dalam pembahasan ini pada skim *mudhârabah*, kemudian menyimpulkan data-data yang ada serta menganalisis data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada substansi atas Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan sebagai pembahasan penelitian.

Penelitian ini menemukan, bahwa landasan *syar'i* pada fatwa DSN tentang tabungan menggunakan hadis *taqririyah* dan *qaulyah* yang bersifat *khabyr*, tidak terdapat hadis yang bersifat *insya'i*. Serta, menggunakan *ijma' sukuti*, yang keuhujjahannya masih dipertentangkan di kalangan ulama. Selanjutnya, mekanisme penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan kurang memberikan penjelasan yang memadai, hanya dijelaskan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dari segi pengawasan, DSN tidak dapat terjun langsung dalam mengontrol aplikasi fatwa oleh pelaku ekonomi syariah. DSN baru dapat bertindak jika ada laporan dari DPS terkait penyimpangan yang terjadi.

Kesimpulan pada penelitian ini, bahwa struktur fatwa DSN tentang tabungan pada konsiderans *syar'i*, hanya menggunakan hadis *khabyr*, tidak terdapat hadis *insya'i*, dan menggunakan *ijma' sukuti*. Substansi fatwa pada bagian keputusan, DSN hanya menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Tanpa ada penjelasan mengenai ketentuan nisbah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Aplikasi fatwa DSN di lapangan dari segi pengawasan masih sangat lemah, karena terkait sifat fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila fatwa dipositivisasi oleh pemerintah ke dalam bentuk peraturan, maka kekuatan hukumnya dapat berubah menjadi mengikat. Namun, yang mengikat hanya substansi fatwa yang telah dipositivisasi saja. Fatwa DSN tetap pada karakter asalnya, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: Fatwa, Dewan Syariah Nasional, Tabungan, *Mudhârabah*.

## ABSTRACT

**Khaeruni Aisya : Economic Fatwa Of DSN-MUI About Savings (Critical Study Of The Fatwa Of National Sharia Council No. 02/DSN-MUI/IV/2000 About Savings On Mudhâra Scheme).**

This research is motivated by the Fatwa of National Sharia Council, which is used as a reference by the regulator in setting the product regulation of Islamic financial institutions such as mudhâra. This research is based on the theory of fatwa, that the legal force of fatwa is not binding.

The purpose of this research is to determine and analyze the structure of the fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about Savings, mechanism to determine fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about Savings and application of fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about Savings.

This research uses a descriptive analysis method, which describe the fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about savings, especially in this discussion on mudhâra scheme, then conclude existing data and analyze the data. This research uses normative juridical approach, that refers to the substance over fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about Savings as a discussion of the research.

This research found, that the sharia foundation of fatwa DSN about savings uses taqiriyah and qauliyah hadith that are khabary, there is no hadith that is insya'i. And using the ijma' sukuti, which its reasoning is still debated among theologians. Furthermore, the mechanism for setting the profit sharing ratio based on fatwa DSN about savings less provide an adequate explanation, only described the profit sharing expressed as a ratio and written in the contract of account opening. In terms of supervision, DSN is unable to involved directly in control the application of fatwa by the Islamic economic actors. DSN can only act if there is a report from DPS related to deviation which happened.

The conclusion on this research, that the structure of fatwa DSN about savings in the preamble syar'i, only use a khabary hadith, there is no an insya'i hadith, and using ijma' sukuti. The substance of fatwa on the decision, DSN only explained that the profit sharing expressed as a ratio. Without any explanation regarding the distribution of ratio that appropriate with the provisions of Islamic law. Application of fatwa DSN in terms of supervision at the field is still very weak, as related to the character of fatwa that does not have any binding legal force. If fatwa legalized by the government into regulation, then the legal force can be turned into binding law. However, only the substance of fatwa that have been legalized can bind. The fatwa of DSN still remains as its original character, which does not have any binding legal force.

Keywords: Fatwa, the National Sharia Council, Savings, Mudhâra.